ABSTRAK

Indonesia telah mengalami 4 zaman yaitu zaman perjuangan kemerdekaan sampai merdeka, zaman orde lama, zaman orde baru dan zaman reformasi atau yang lebih dikenal dengan nama orde Indonesia baru. Khususnya untuk zaman orde baru sebagai bukti berjalannya negara demokratis diperlukan adanya pelaksanaan fungsi dari demokrasi yaitu adanya pelaksanaan pemilu. Pada zaman ini pelaksanaan pemilu berjalan secara periode selama 6kali berturut-turut. Pada setiap pemilu tersebut muncul suatu partai yang bernama Golkar yang selalu mendapat suara mayoritas lebih dari 60 % suara dari para pendukungnya, baik di kota maupun di desa. Namun pada zaman berikutnya terjadi perubahan dimana Golkar hanya menempati posisi kedua setelah PDI-P Dengan mendapat total suara tidak lebih dari 17 %, sedangkan partai yang unggul pada zaman ini tidak pernah mendapat suara lebnih dari 10 % dan pada pemilu terakhir ini mendapat suara kira-kira 35 %. Tapi khususnya di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini justru Golkar mendapat keunggulan walaupun kemenangannya tipis yang hampir tersaingi oleh partai baru hasil reformasi yaitu PAN. Pada hal daerah penelitian ini merupakan daerah fanatik Islam yang dinamakan juga Kota Serambi Mekkah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa orang masih bersedia mendukung Golkar dan tidak memilih partai yang lain serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang memilih Golkar..

Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif dengan penggunaan data kuantitatif secara angka persen dengan subyek penelitian adalah seseorang yang telah berumur 17 tahun atau telah boleh ikut pemilu dengan lokasi penelitian Kotamadya Padang Panjang dengan mengambil 4 kelurahan dari 2 kecamatan yang ada. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perubahan perilaku pemilih khususnya untuk pendukung Golkar dari segi panutan terhadap seorang tokoh, identifikasi kepartaian maupun dari segi struktur sosial terutama dalam tingkat usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dari pemilu-pemilu selama orde baru terhadap pemilu zaman reformasi. Hasil ini juga menunjukan bahwa mobilisasi politik Golkar yang selama 6 kali pemilu di zaman orde baru hanya membuahkan hasil dari kuantitas hasil pemilu tapi tidak demikian halnya dari segi kualitas terutama tentang pendalaman ideologi partai dari setiap pendukungnya ; karena kalau ada perubahan situasi pada suatu masa tertentu terjadi pula perubahan yang fundamental terhadap pendukung Golkar.

PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILU
Kasus di Kodya Padang Panjang 1992-1999

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 8 kali dalam 3 zaman, yaitu zaman orde lama 1 kali (1955) dengan sistim multi partai ; zaman orde baru 6 kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997) dengan 2 partai politik dan satu golongan karya sehingga dapat disebut dengan sistim dwi partai, serta satu kali pada zaman reformasi (1999) dengan kembali pada sistim multi partai, dimana partai tumbuh kembali dengan jumlah 48 buah partai politik.

Dua pemilu pada masa orde baru yaitu 1992 dan 1997, Golkar memperoleh suara terbanyak yaitu mencapai 80 %, sedangkan pada pemilu zaman reformasi perolehan suara Golkar terjadi penurunan perolehan suara dimana hanya memperoleh suara sekitar 17 %. Pada zaman reformasi ini, perolehan suara Golkar pada tingkat pusat memang tidak nomor satu, namun jika dilihat dari 24 propinsi yang ikut dalam pemilu tahun 1999 ini, perolehan suara Golkar sangat bervariasi. Perolehan suara Golkar teratas pada daerah luar Jawa, sedangkan PDI-perjuangan memperoleh kemenangan didaerah Jawa, kecuali di Jawa Timur didominasi oleh PKB.

Khususnya di Sumatra Barat dari 8 kabupaten dan 6 Kotamadya, Goplkar memperoleh suara terbanyak pada 5 Kabupaten, yaitu Tanah Datar, Pasaman, Pesisir Selatan, Solok dan Sawahlunto Sijunjung, dan 4 Kotamadya, yaitu Solok, Payakumbuh, Padang Panjang dan Sawahlunto. Di Kotamadya Padang Panjang sendiri Golkar memperoleh kemenangan, namun dapat diimbangi oleh partai baru hasil reformasi yaitu Partai Amanat Nasional(PAN), justru partai politik di zaman orde baru yaitu PPP menempati posisi ke 3.

Jika dilihat dari latar belakang Kotamadya Padang Panjang yang merupakan basis Islam dengan sebutan kota Serambi Mekkah, Golkar tetap unggul. Padahal dalam pemilu tahun 1999 ini sudah diberlakukan UU No.2/1999 tentang partai politik (Satya Arinanto, 1999 : h.82), yang mengandung paradigma baru tentang sumbangan yang maksimal yang dapat diberikan oleh setiap orang, perusahaan atau badan lainnya kepada salah satu partai politik, dan tidak terbatas pada satu partai politik seperti pada zaman orde baru.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kotamadya Padang Panjang, khususnya meninjau 3 pemilu yaitu 2 pemilu di zaman orde baru (1992 dan 1997) dan pemilu pada zaman reformasi (1999) tentang perilaku pemilih terhadap partai politik dalam pemilu tersebut. Penelitian ini telah dilaksanakan pada 2 Kecamatan yaitu Silaing atas dan Silaing bawah dengan mengambil 4 kelurahan yaitu Silaing bawah, Kampung Manggis, Koto Katiek dan Guguk Malintang dengan jumlah rresponden sebanyak 60 orang.

2. PERMASALAHAN

Selama pemerintahan orde baru, pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara teratur yaitu tiap 5 tahun sekali sebanyak 6 kali sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Dalam setiap pemilu tsb Golkar selalu menang, dengan presentase di atas 67 % pada 3 kali pemilu pertama dan diatas 70 % pada pemilu tahun 1987 yakni 73 % (W.Liddle, 1992 : h.90), kecuali pada tahun 1992, Golkar hanya memperoleh suara sebanyak 68, 1 %. Sedangkan partai politik yang lain partai politik yang lain yaitu PPP dan PDI masing-masing memperoleh presentase suara antara 30 % dan 10 %. Kemenangan Golkar secara konsisten dalam setiap pemilu tidak dapat dilepaskan dari dukungan birokrasi pemerintah dan kericuhan internal PPP dan PDI yang tidak pernah selesai. Selain itu kemenangan Golkar juga disebabkan karena rekayasa massa pendukung partai supaya berubah sikap dan akhirnya mendukung Golkar (A.Sanit, 1997 : h.103), dalam hubungan ini ada 3 bentuk rekayasa politik, yaitu :

a. Menanamkan ideologi pembangunan sebagai pengganti ideologi masyarakat sipil
b. Diterapkan kebijaksanaan politik massa mengambang, dimana masyarakat yang terorganisir dilarang berafiliasi secara permanen kepada partai politik.
c. Secara organisatoris penyapihan rakyat dari partai, yang didukung oleh kebijaksanaan yang meniadakan organisasi partai ditingkat Kecamatan dan Desa, sehingga partai tidak mempunyai lembaga di desa.

Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa kemenangan yang diperoleh Golkar secara berturut-turut sepanjang praktek pemilu orde baru diraih dengan cara-cara yang tidak elegan dan tidak terhormat. Ketidak hormatan itulah yang kemudian disimpulkan secara baik oleh W.Liddle (Tim Lip Fisip UI, 1998 :55) :

> "Pemilu orde baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu itu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi, tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai milik pemerintah. Kompetisis ditekan seminimal mungkin dan keragaman pandangan tidak memperoleh tempat yang memadai."

Pada zaman reformasi ini setelah turunnya Soeharto sebagai Presiden, telah melahirkan paradigma baru dalam kehidupan politik Indonesia. Paradigma tersebut antara lain tampak dalam kehidupan kepartaian dan pemilu, yaitu dengan lahirnya UU No.2/1999 tentang partai politik, misalnya telah merombak total kehidupan dalam hal kebebasan berserikat. Selain itu juga telah lahir pula UU No.5/1999 tentang kenetralan pegawai negeri sipil. Hal ini semua mengakibatkan bahwa rakyat atau individu dalam masyarakat bebas menentukan keputusan untuk terlibat dalam partai politikmaupun bebas menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu.

Pengaruh timbulnya ke 2 undang-undang tersebut di atas dapat dilihat dari hasil pemilu 1999 yang baru lalu bahwa yang berhasil memperoleh suara terbanyak adalah PDI-P dengan jumlah perolehan suara mencapai 34 %, sedangkan Golkar

hanya memperoleh 17 % suara yang menduduki posisi ke 2. Terlihat bahwa perolehan suara yang didapatkan Golkar terjadi penurunan yang jauh sekali.
Namun jika dilihat hasil perolehan suara dari setiap propinsi terlihat bahwa keunggulan Golkar berasal dari luar Jawa, kecuali Sumatra Selatan, Lampung Golkar unggul dalam perolehan suara, termasuk didalamnya propinsi Sumatra Barat Golkar memeproleh suara terbanyak.
Khususnya di Sumatra Barat keunggulan Golkar sangat dominan yaitu pada 5 Kabupaten dan 4 Kotamadya. Dalam hal ini yang menarik adalah di Kotamadya Padang Panjang, dimana keunggulan Golkar dapat disaingi oleh partai politik hasil reformasi yaitu PAN. Pada hal kalau dilihat dari hasil perolehan suara pemilu tahun 1977 di Kotamadya Padang Panjang ini PPP sangat dominan dari Golkar. Kalau dilihat dari sejarahnya, Padang Panjang ini merupakan daerah fanatik Islam yang dinamakan juga kota Serambi Mekkah.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan dilakukan di Kotamadya Padang Panjang dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Mengapa orang bersedia mendukung Golkar dan tidak memilih partai yang lain ?
b. Faktor-faktor determinan apa saja yang mendorong seseorang cenderung memberikan dukungan kepada Golkar dan tidak memilih partai politik yang lain ?

3. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilu adalah lembaga dan proses politik demokrasi, fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Operasionalisasinya bekerja untuk memilih atau menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemerintahan. Pada sisi lain pemilu adalah mekanisme perebutan kekuasaan secara damai diantara kelompok masyarakat yang mempunyai perbedaan kepentingan yang beraneka ragam. Oleh sebab itu pemilu juga merupakan arena adu kekuatan diantara partai politik dalam memperebutkan kekuasaan melalui dukungan masyarakat. Dengan demikian pemilu adalah kompetisi memperebutkan suatu fenomena politik yaitu kekuasaan. Jadi pemilu sebagai instrumen yang dapat mengatur perebutan dan pergantian kekuasaan secara damai, ini hanya akan terwujud dan menghasilkan tertib politik yang demokratis kalau diselenggarakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Jadi pemilu tidak hanya sekadar memberikan hak warga negara untuk memilih pemerintahan, tetapi berfungsi pula membatasi para pimpinan politik agar berperilaku sebaik mungkin supaya dapat dipilih kembali dalam pemilu berikutnya.
Sejak Indonesia merdeka telah 8 kali diadakan pemilu, namun belum banyak para pemerhati politik Indonesia yang melakukan kajian yang mendalam tentang perilaku pemilih. Para ilmuwan politik seperti Herbert Feith, William Liddle (M.Asfar, 1996 : h.46) dalam mengamati partai politik dan pemilu di Indonesia lebih banyak memfokuskan pada proses pelaksanaan pemilu, karakteristik para pendukung partai, hasil perolehan suara dan lain sebagainya.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif, karena penelitian ini ingin mengetahui faktor determinan yang membentuk perilaku memilih masyarakat secara rinci dan fokus perhatiannya pada kasus tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana responden dipilih secara sengaja (purposive sampling) yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kasus penelitian (Prisma, No.3 1996 : h.39). Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah proses seseorang untuk mendukung dan kemudian memilih partai tertentu dalam pemilu, maka unit analisanya adalah individu yang telah berumur 17 tahun pada saat penelitian ini dilakukan, dengan asumsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah ikut satu kali dalam pemilu.

Data-data tersebut akan diperoleh dari data primer dan data sekunder, data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah berupa hasil-hasil perolehan suara dari tahun-tahun pemilu yang diperlukan dalam kasus penelitian ini. Sedangkan data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan. Data kualitatif dan kuantitatif ini akan dianalisa secara kualitatif. Analisa data akan dijelaskan secara kronologis dan pembahasannya diselingi dengan pengungkapan kasus-kasus yang dialami responden dan kemudian diinterpretasi.

Penelitian ini akan dilakukan di Kotamadya Padang Panjang pada 2 Kecamatan yaitu Silaing atas dan Silaing Bawah dengan mengambil 2 Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yaitu Silaing Bawah, Kampung Manggis, Koto Katiek dan Guguk Malintang. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena hasil perolehan suara khususnya pada pemilu tahun 1999 ini partai Golkar tetap memperoleh suara terbanyak, walaupun rakyat telah bebas menentukan pilihan dukungan kepada salah satu partai politik berdasarkan UU tentang partai politik dan pemilu dan tidak terikat kepada salah satu partai politikpun.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat tentang pemimpin yang menempati rangking teratas adalah mereka yang memegang posisi dalam pemerintahan.(aparat pemerintahan terutama pejabat kelurahan). Ini dapat dilihat dari 59 responden yang diwawancarai terhadap hasil dari 3 pemilu terjadi perubahan terutama dalam tahun 1999 di mana pemimpin yang dianggap teratas yaitu dari birokrat terhadap pemilihan suara Golkar terjadi penurunan dari 29 suara yg diperoleh baik pada pemilu 1992 maupun 1997, menjadi 16 suara yang diperoleh Golkar pada pemilu 1999. Ini berarti terjadi perubahan hubungan antara tokoh yang disegani terhadap pemilihan suara (voting). Sedangkan dari pemimpin agama yang sangat mempengaruhi dalam pemberian suara terhadap Golkar adalah KUA, Guru mengaji dan Kiai. Dari pemimpin masyarakat di mana tokoh yang mempengaruhi pemberian suara terhadap Golkar adalah dari para Ninik Mamak dan Cerdik pandai (Dokter).

Mengenai identifikasi kepartaian tokoh panutan diikuti pula oleh seseorang yang mengakui tokoh tersebut sebagai panutannya dalam pemilihan suaranya. Di Kotamadya Padang Panjang dari 4 kelurahan (59 responden) pada tahun 1992, 45 responden (76,27 %) mengakui birokrat sebagai panutannya. Dari jumlah tersebut 11 responden (18,67 %) menganggap panutannya dekat dengan PPP ; 29 responden (49.15 %) dekat dengan Golkar dan 4 responden (6,94 %) dekat dengan PDI serta 1 responden (1,69 %) dekat dengan golput.Sedangkan dari sudut pandang tokoh masyarakat, hanya sekitar 6 responden (10,17 %) yang menganggap tokoh masyarakat sebagai panutannya, dan hanya 2 responden (3,33 %) yang dekat dengan Golkar dan 3 responden (5,01 %) yang dekat dengan PPP. Dari sudut pandang pemimpin umat, lebih sedikit dari tokoh masyarakat sebagai panutannya, hanya 4 responden (6,94 %) dekat dengan Golkar dan 3 responden (5,01 %) dekat dengan PPP. Sedangkan pada tahun 1997, yang hanya mengalami perubahan pada pemimpin umat sebagai tokoh panutannya, di mana terjadi pengurangan yang dekat dengan PPP menjadi 2 responden (3,33 %). Lain halnya yang terjadi pada tahun 1999 pada era reformasi, tokoh panutan dari birokrat yang dekat golkar hanya tinggal 16 responden (27,12 %) terhadap 29 responden dari 2 pemilu sebelumnya. 7 responden dekat dengan PPP ; 4 responden dekat dengan PDI-P ; 12 responden dekat dengan PAN ; 1 responden dekat dengan PBB, PUI dan PRD dan juga ada 2 responden sebagai golput. Sedangkan dari baik tokoh Masyarakat dan pemimpin umat terjadi penurunan hanya 1 dan 2 responden yang dekat dengan Golkar, lainnya dekat dengan PPP (3 dan 2) dan dekat dengan PAN (3) serta dekat dengan PBB (2).

Mengenai hubungan antara struktur masyarakat dan perilaku pemilih di Kotamadya Padang Panjang dilakukan dengan berdasarkan pada kelompok usia, pendidikan dan pekerjaan.

Pada pemilu 1992 dan 1997 tidak terjadi perubahan perilaku pemilih dari pendidikan pendukung Golkar, namun pada pemilu 1999 terjadi perubahan perilaku pemilih pendukung Golkar yang sangat drastis yaitu dari 10 suara menjadi 5 suara untuk tingkat pendidikan SD , hal ini berlaku juga pada tingkat pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi.

Dalam hal jenis pekerjaan terhadap perilaku pemilih pendukung Golkar pada pemilu 1992 dan 1997 masih didominasi oleh PNS sebesar 14 suara terhadap 59 responden dan hanya sedikit mengalami perubahan pada pemilu 1999 terhadap pendukung Golkar, karena belum tersosialisasinya UU tentang Kepartaian dan kenetralan PNS. Pada pemilu 1999 terjadi penurunan pendukung Golkar dari PNS dari 15 suara (1997) menjadi 10 suara (1999), yang lebih mendukung partai lain hasil dari reformasi yaitu PAN, PBB dan PUI. Sama halnya pada jenis pekerjaan Swasta terjadi penurunan pendukung Golkar dari 10 suara di tahun 1997 menjadi 6 suara di tahun 1999, dimana mereka lebih tertarik pada PDI-P dan PAN.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukan bahwa pendukung Golkar didominasi oleh kelompok dewasa pada usia 27-36 tahun berjumlah 23 responden (39 %) dari 59 responden. Hal ini sangat berbeda pada kelompok usia remaja yang telah memasuki hak pilihnya di mana pendukung Golkar tidak ada sama sekali pada 4 Kelurahan di Kotamadya Padang Panjang.

Pendukung pada kelompok usia ini memberikan suaranya pada PPP dan PDI dan PDI-P. Kemudian pada kelompok usia tua dari 47 sampai dengan 67 tahun keatas pendukung Golkar masih unggul tapi tipis karena disaingi oleh partai baru hasil reformasi yaitu PAN dan PDI-P.Selain daripada kelompok usia tua tersebut di atas berikut ini dapat dijelaskan bahwa pendukung Golkar pada kelompok usia 37-46 tahun terhadap 3 pemilu menunjukan tendensi menurun yaitu dari jumlah 44 suara menjadi 31 suara atau 22,2 % terhadap jumlah responden secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pendukung Golkar di lokasi penelitian ini lebih didominasi oleh kalangan usia dewasa dan usia tua bila dibandingkan dengan kelompok usia remaja. Disamping jika dilihat dari segi pendidikan terhadap pemberian suara dimana pendukung Golkar terjadi penurunan dalam setiap tingkat pendidikan yang ada kecuali tingkat SLTP. Lain halnya jika dilihat dari segi pekerjaan terlihat bahwa dari 2 pemilu orde baru suara banyak masuk ke Golkar dari PNS bila dibandingkan dengan 2 jenis pekerjaan yang ada yaitu swasta dan ibu rumah tangga. Namun terjadi perubahan pada pemilu 1999 pendukung Golkar mulai menurun dari ke 3 jenis perkerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terungkap bahwa mobilisasi politik golkar sudah mulai menurun dari variabel-variabel yang menjadi ukuran dalam penelitian ini. Ini berarti pendukung Golkar pada zaman orde baru dalam pemberian suaranya bukan benar-benar suara hatinya dan tidak berakar atau mendalam tapi lebih merupakan gerakan yang dipaksakan dari atas.

Hasil temuan yang lain dapat digambarkan bahwa faktor-faktor pendorong masih kuatnya pendukung golkar karena dari segi panutan seseorang pada seorang tokoh tertentu dan juga dari segi jenis pekerjaan terutama PNS.

6. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukan telah terjadi polarisasi dan perubahan perilaku memilih baik dari segi panutan terhadap seorang tokoh, identifikasi kepartaian maupun dari segi struktur sosial terutama dalam segi usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dari pemilu-pemilu zaman orde baru kepada zaman reformasi. Walaupun terjadi perubahan perilaku pemilih pada pendukung Golkar,namun suara Golkar masih menunjukan keunggulannya walaupun sangat tipis tapi dapat disaingi oleh partai baru hasil reformasi yaitu PAN.

Kemudian dapat juga dijelaskan dari hasil penelitian kenapa masih juga Golkar mendominasi suara dalam pemilu terakhir ini karena alasan-alasan di bawah ini :

1. Dalam segi pekerjaan dimana PNS masih setia mendukung Golkar
2. UU kepartaian yang baru keluar dalam PNS dan masyarakat belum tersosialisasikan dengan merata dan baik
3. Birokrasi dikalangan basis daerah militer masih mempengaruhi pendukung Golkar
4. Pengaruh faktor panutan dalam keluarga
5. Hasil pengkaderan politik Golkar melalui massa teramat panjang

6. Peranan mass media cetak dan elektronik sebagai alat pemerintah berjalan mulus tanpa rintangan
7. Mobilisasi politik Golkar didukung oleh pemerintah dan militer

Secara umum penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perilaku politik, khususnya perilaku memilih disesuaikan dengan fungsi dari sikap atau situasi sosial, ekonomi dan politik pada suatu masa tertentu. Ini berarti mobilisasi politik Golkar yang selama 6 kali pemilu membuahkan hasil dari segi kuantitas tapi tidak demikian halnya dari segi kualitas terutama tentang kedalaman ideologi partai bagi setiap pendiukungnya, karena adanya sedikit atau banyak perubahan situasi pada suatu masa terjadi pula perubahan yang fundamental terhadap pendukung Golkar.

Dalam hal ini perlu dicari pembenahan baik kedalam maupun keluar dari politik Golkar terutama yang keluar yaitu adanya usaha secara bertahap dan konsisten pengenalan nilai-nilai politik yang demokratis dari program-program yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Golkar kepada masa pendukungnya, agar benar-benar masyarakat dapat mengetahui dan mendalami politik Golkar dan akhirnya akan secara sukarela dan ikhlas mendukung Golkar. Jadi politik Golkar tersebut dapat mengakar dalam masyarakat dan tidak akan terjadi perubahan perilaku pemilih pendukung Golkar kalau terjadi perubahan di dalam suatu negara.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian in terlaksana berkat bantuan dari dana penelitian SPP/DPP Unand tahun 1999 2000, untuk itu diucapkan terima kasih kepada :

a. Lembaga Penelitian yang telah memberikan dana pada peneliti
b. Pembimbing dan kawan seprofesi serta para mahasiswa yang turut membantu dalam penelitian ini. Dalam hal ini juga anggota keluarga yang dengan sabar dan ikhlas mendukung dalam penyelsaian artikel penelitian ini.

8. DAFTAR PUSTAKA

Arinanto Satya, Pemilihan Umum, Demokrasi dan Paradigma Baru Kehidupan Politik , dalam **Jurnal Ilmu Sosial "UNISIA"**, Yogyakarta : UII, 1999

Asfar Muhammad, Beberapa pendekatan dalam memahami perilaku memilih dalam **Jurnal Ilmu Politik,** Jakarta : Gramedia, No.16, 1996

Chaidar AL, **Pemilu 1999, Pertarungan Ideologi Partai-partai Islam Versus Sekuler,** Jakarta : Darul Falah, 1999

Kompas, 5 Juli 1999

Kristiadi J, Partai Politik Kemampuan Menggalang Dukungan, dalam **Analisa CSIS**, Jakarta : CSIS, No.2 1999

Liddle William, **Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik**, Jakarta : LP3ES, 1992

Mashad Dhurorudin, **Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru,** Jakarta : CIDES, 1999

Sanit Arbi, **Partai, Pemilu dan Demokrasi**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

Singgalang, 17 Juni 1999

Taqwa Ridhah M, Perilaku Pemilih Umat Islam Indonesia, **dalam Prisma,** Jakarta : LP3ES, 1996

Tim Laboratorium Ilmu Politik FISP-UI, Upaya mengembalikan Kedaulatan Rakyat : Reformasi UU Pemilu, dalam Seni Penerbitan Studi Politik, Jakarta : Lip-Fisip-UI dan Mizan, 1998